

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dalam mencapai sasaran program dan IKU tahun 2016, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Realisasi kinerja BPKP tahun 2015 tercermin dari pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 4.1
Capaian Sasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Tahun 2016

No	Sasaran Program	Capaian IKU
1	Sasaran Program 1	IKU 1 Tercapai 121,69% IKU 2 Tercapai 80% IKU 3 Tercapai 166,67%
2	Sasaran Program 2	IKU 4 Tercapai 100% IKU 5 Tercapai 0% IKU 6 Tercapai 32,06% IKU 7 Tercapai 0%
3	Sasaran Program 3	IKU 8 Tercapai 100% IKU 9 Tercapai 100% IKU 10 Tercapai 100% IKU 11 Tercapai 200%
4	Sasaran Program 4	IKU 12 Tercapai 111,4%

Uraian ringkas hasil pengukuran dari delapan IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi”, diukur berdasarkan IKU sebagai berikut:

- a. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Prioritas Nasional dengan realisasi 54,76% dari target 45% sehingga memperoleh capaian 121,69%.
 - b. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi dengan realisasi 80% dari target 100% sehingga memperoleh capaian 80%.
 - c. Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian Kepada Aparat Penegak Hukum dengan realisasi 100% dari target 60% sehingga memperoleh capaian 166,67%
2. Sasaran Program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah/Korporasi” diukur berdasarkan empat IKU sebagai berikut:
- a. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3), tercapai 100%.
 - b. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3), belum tercapai.
 - c. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina, dengan realisasi 16,67% dari target 52% sehingga memperoleh capaian 32,06%.
 - d. Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina, belum tercapai.
3. Sasaran Program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda” diukur berdasarkan empat IKU sebagai berikut:
- a. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3), tercapai 100%.
 - b. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3), dengan realisasi 16,67% dari target 16,67% sehingga memperoleh capaian 32,06%.
 - c. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2), dengan realisasi 83,33% dari target 66,67% sehingga memperoleh capaian 100%.
 - d. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1), dengan realisasi 0% dari target 16,67% sehingga memperoleh capaian 200%.
4. Sasaran Program “Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo” diukur berdasarkan IKU “Persepsi kepuasan layanan kesestamaan” dengan realisasi 111,4%.

Disadari sepenuhnya bahwa pencapaian sasaran strategis memerlukan upaya dan kerja keras yang berkesinambungan. Kendala pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pedoman Evaluasi Maturitas SPIP pada Pemda masih dalam proses penyempurnaan.
2. Peningkatan level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP menjadi level 3 tidak dapat dicapai dalam waktu singkat.
3. Kurangnya koordinasi secara efektif dengan Pemda.
4. Belum dirasakan manfaat nyata dari SPIP dan Kapabilitas APIP oleh Pemda.
5. Kurangnya komitmen pimpinan mitra kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh BPKP.

Langkah-langkah yang direncanakan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP mitra kerja untuk mendorong peningkatan kapabilitas APIP.
2. Meningkatkan/mengembangkan kompetensi SDM BPKP.
3. Memantau dan mendorong instansi yang dievaluasi untuk menetapkan kebijakan sesuai dengan rekomendasi yang disarankan.
4. Melaksanakan diklat/sosialisasi/workshop penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP bagi Pemerintah Daerah.
5. Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP.
6. Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Daerah untuk percepatan peningkatan kapabilitas APIP serta implementasi dan internalisasi penyelenggaraan SPIP menuju level 3 secara integral dalam kegiatan instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi.